

BAB II

KERJASAMA PT. PERTAMINA (PERSERO) – EXXONMOBIL CORPORATION DALAM EKSPLORASI MIGAS BLOK CEPU

A. Kerjasama Eksplorasi Migas Antara PT. Pertamina (Persero) – ExxonMobil Corporation

1. Latar Belakang Kerjasama

Industri perminyakan Indonesia, saat ini sedang mengalami ujian yang sangat berat. Produksi *crude oil* nasional mengalami penurunan cukup tajam. Hal ini bisa berdampak negatif pada kinerja ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dimana 23,6% pendapatan negara ditopang sektor perminyakan ini. Produksi *crude oil* Indonesia mengalami penurunan sekitar 350 ribu sampai 200 ribu barel per hari. Angka produksi *crude oil* Indonesia jauh lebih kecil dibanding batas produksi sebagai anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang mencapai 1,4 juta barel per hari.

Saat ini Indonesia terpaksa mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) sampai ratusan ribu barel per hari. Impor tersebut tak lain untuk menutup kesenjangan produksi dengan konsumsi dalam negeri yang terus meningkat mencapai 1,3 juta barel per hari. Dibanding dengan produksi saat ini berdasar data BP Migas, jelas terlihat produksi dalam negeri tak lagi mampu memenuhi konsumsi dalam negeri.

Gambaran suram perminyakan negeri ini jadi semakin nyata jika menyimak data Asosiasi Perminyakan Indonesia (Indonesia Petroleum Association, IPA). Data itu menyebutkan potensi cadangan minyak Indonesia sekitar 9 miliar barel, yang sekitar 50 persen atau 4,5 miliar barel sudah

dieksplorasi dan diproduksi. Dengan jumlah cadangan minyak yang tinggal 4,5 miliar barel, diperkirakan cadangan minyak itu akan habis dalam kurun 10 tahun, dengan asumsi tidak ada eksplorasi cadangan.

Dengan ditemukan dan siap diproduksinya beberapa sumur di blok Cepu, khususnya di lapangan Banyu Urip, Bojonegoro, kemungkinan untuk mendongkrak produksi harian minyak mentah Indonesia kembali terbuka.

Jika proses produksi lapangan Banyu Urip sudah berjalan, diharapkan produksi harian minyak mentah Indonesia mencapai kembali batas diperbolehkannya masuk sebagai anggota OPEC, yakni 1,4 juta bopd, dimana dari jumlah tersebut 150.000 hingga 170.000 bopd berasal dari Blok Cepu.

Dipandang dari sisi teknologi, perlu diingat bahwa pencapaian produksi harian sebesar 170.000 bopd memerlukan *technical knowhow* yang sangat besar. Dilihat dari status jumlah cadangan terbukti dan potensial yang ada di Blok Cepu (khususnya lapangan Banyu Urip), jumlah ini merupakan *peak production rate* (PPR) yang akan dicapai 2-3 tahun pada saat awal pekerjaan produksi dan pengembangan; untuk kemudian akan menurun lagi dalam masa 4-5 tahun setelah terjadinya PPR. Laju produksi seperti ini dikenal dalam dunia industri hulu migas sebagai laju Hubbert, atau kurva Hubbert. Oleh karena itu sudah menjadi suatu kemestian bahwa pengelolaan sumber daya migas mempertimbangkan aspek-aspek teknis, visi masa depan dan analisa resiko.

Dibukanya kesempatan partisipasi daerah dalam pengelolaan migas melalui UU No. 22 tahun 2001, seharusnya dijadikan wahana pembelajaran daerah untuk minimal – namun bisa lebih dari itu :

1. mempunyai pengalaman dari sisi teknis-logistik, administratif dan yuridis tentang pengelolaan sumber daya migas di daerahnya; mulai dari pengenalan aspek teknis eksplorasi dan produksi migas, pola kerjasama dengan industri pengelola dan –yang paling utama– dengan pengalaman tersebut menjadi partner yang terpercaya baik dengan industri pengelola, maupun badan regulator pemerintah pusat. Pada gilirannya, pengalaman seperti ini akan membuka peluang partisipasi langsung dalam pengelolaan migas, tidak hanya di Jawa Timur, namun juga di daerah lain.
2. membuka peluang partisipasi putra-putri daerah menjadi *direct person in charge* atau subyek pengelola langsung sumber daya migas yang pada gilirannya akan menjadi key person dalam upaya-upaya pengembangan sumber daya migas di Jatim yang menurut statistik masih dipandang menjanjikan.¹

Kegiatan eksplorasi ini dilakukan melalui kontrak kerjasama antara perusahaan minyak negara yaitu PT. Pertamina (Persero) melalui anak cabangnya, Pertamina EP Cepu dengan perusahaan minyak raksasa Amerika yaitu ExxonMobil Corporation dengan anak cabangnya Mobil Cepu Limited dan Ampolex Cepu Ltd.

2. Nota Kesepahaman (MoU)

Nota Kesepahaman (MoU) perpanjangan kontrak pengelolaan lapangan minyak dan gas di Blok Cepu, Jawa Timur ditandatangani oleh Ketua Tim ExxonMobil Stephen M Greenle dan Ketua Tim Negosiasi Perpanjangan Kontrak

¹ Makky S. Jaya, BEBERAPA POKOK PIKIRAN PENGELOLAAN BLOK CEPU: PERANPEMDA DAN DPRD JATIM, dalam
Beberapa%20Pokok%20Pikiran%20Pengelolaan%20Blok%20Cepu%20-
%20Peran%20Pemda%20dan%20DPRD%20Jatim

ExxonMobil bentukan pemerintah Martiono Hadiano pada tanggal 25 Juni 2005 yang disaksikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Aburizal Bakrie.

Pada pertemuan ini lahir kesepakatan bersama kedua belah pihak yaitu penandatanganan kontrak antara Pertamina dengan ExxonMobil harus segera terealisasi. Dan disepakati juga mengenai persoalan penyertaan modal (*Participating Interest*) dan bagi hasil berdasarkan tingkat harga minyak mentah di pasar dunia. Pertamina dan ExxonMobil diwajibkan menyertakan modal masing-masing sebanyak 45%. Apabila pemerintah daerah ingin berpartisipasi, pemerintah daerah harus menanamkan modal 10%. Dan untuk bagi hasil MoU menetapkan pola bagi hasil dengan ketentuan jika harga minyak mentah dunia berada pada level di atas 45 dollar AS per barel pembagian hasil antara Pertamina, ExxonMobil dan pemerintah daerah menjadi 85:15. Sedangkan jika harga minyak mentah dunia kurang dari 35 dollar AS pembagian hasil menjadi 70:30 menyesuaikan dengan harga minyak mentah dunia.²

Akhirnya setelah melalui proses yang panjang, MoU berganti menjadi Kontrak Kerja Sama (KKS) pada tanggal 17 September 2005 yang merubah status perusahaan Blok Cepu dari *Technical Assistance Contract* (TAC) menjadi KKS berjangka waktu 30 tahun, yang akhirnya ditetapkan melalui perjanjian kesepakatan kerja sama operasi (*Joint Operation Agreement*) ditandatangani oleh President dan General Manager ExxonMobil Peter J Coleman dan direktur Pertamina EP Cepu Hestu Bagyo, yang mewakili anak perusahaan Mobil Cepu Limited (MCL) dan Ampolex Cepu Ptd Ltd (ACL) yang disaksikan oleh Menteri Negara BUMN Sugiharto, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan didampingi

² Media Indonesia, Secercah Harapan Dari Cepu, 4 Mei 2009

Dirut PT. Pertamina (Persero) Ari H. Soemarno, hadir pula Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu (BP) Migas Kardaya Warnika, Komisaris Utama Pertamina Mardiono hadianto, Ketua Tim Negoisasi Blok cepu Roes Aryawijaya, Vice President Planning, Commercial and Public Affairs Emoi Maman Budiman, dan Executive Director Exploration Emoi Budiono di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2006. Yang isinya menetapkan struktur organisasi bersama pengelolaan Blok Cepu dan ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu yang tertuang dalam Cepu Organization Agreement. Struktur Organisasi Bersama ini terdiri atas Komite Organisasi Bersama (JOC) yang berwenang membuat maupun memutuskan perencanaan operasi, rencana program kerja dan anggaran, persetujuan pengeluaran maupun pelaksana kegiatan operasi. JOC ini beranggotakan 5 orang, 2 dari Pertamina EP Cepu (PEPC) dan Mobil Cepu Ltd (MCL)/Ampolex Cepu Ltd, dan 1 dari unsur BUMD/Pemda.³

Komite organisasi bersama ini akan membawahi Organisasi Proyek Cepu. Organisasi Proyek Cepu terdiri atas General Manager dan Manager. Posisi General Manager dipegang oleh Mobil Cepu Ltd, sedangkan wakilnya oleh Pertamina. Berkembang asumsi, ExxonMobil diuntungkan dengan kedudukannya sebagai General Manager, asumsi tersebut tidak benar dikarenakan beberapa hal :

1. Pertama, General Manager adalah pelaksana keputusan Komite Operasi Bersama (JOC) yang diketuai oleh wakil dari pihak Pertamina (PEPC). Wewenang untuk membuat dan memutuskan perencanaan operasi, program kerja, dan anggaran ada pada JOC bukan pada General Manager.

³ Media Indonesia, Bersama mengoperasikan Blok Cepu, 22 Maret 2009

2. Kedua, seluruh perencanaan dan pengeluaran anggaran akan diaudit secara ketat dan berlapis, dan harus mendapat persetujuan dari BP Migas.

Pertamina dan ExxonMobil memperkirakan perlu waktu 31 bulan untuk sampai ke tahap produksi awal Blok Cepu. Itu berarti minyak baru bisa mengucur pada akhir 2008 atau awal tahun 2009.⁴

Segera setelah penandatanganan JOA, harus segera dibuat Plant of Development (PoD) untuk diajukan ke BP Migas. PoD adalah masterplan yang memuat rencana kerja dan anggaran secara keseluruhan selama proses operasi berlangsung. Dalam waktu 1 bulan BP Migas akan meneliti dan menelaah secara detail untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi. JOC juga harus menyusun *Work Program and Budget* untuk diajukan ke BP Migas. BP Migas mempunyai otoritas penuh untuk menolak atau menerima *PoD dan Work Program and Budget*, atau meminta revisi.

3. Manfaat Kerjasama Blok Cepu Bagi Daerah Jawa Timur

Kerjasama yang dilakukan antara PT. Pertamina (Persero) dengan ExxonMobil Corporation dalam mengelola migas di Blok Cepu tentu saja memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan khususnya untuk daerah Jawa Timur. Keuntungan yang diperoleh daerah Jawa Timur antara lain adalah :

1. Pengembangan lapangan minyak Banyu Urip akan menambah produksi minyak hingga 165.000 barrel per hari pada produksi puncaknya, yang akan menambah kapasitas produksi minyak saat ini hingga 20 persen. Lebih dari 93 persen total pendapatan akan diperoleh Indonesia.

⁴ Koran Tempo, Exxon Segera Garap Cepu, 14 Maret 2009

2. Ketika produksi puncak dan dengan asumsi harga minyak saat ini, Indonesia akan menerima lebih dari 9 juta dollar AS (Rp. 85/miliar), atau sekitar 3,3 miliar dollar AS per tahun (Rp. 33triliun/hari)⁵
3. Menarik investasi asing kurang lebih 2,5 miliar dollar AS, yang terdiri dari Capex 1,14 miliar dollar AS dan Opex 1,28 miliar dollar AS.⁶
4. Pengembangan proyek Cepu dan produksinya akan berdampak positif bagi industri lainnya dan masyarakat sekitarnya melalui peningkatan hasil ekonomi, lapangan kerja, dan program-program pengembangan masyarakat. Ahli-ahli ekonomi telah memperkirakan “multiplier effect” tersebut bisa mencapai 1,5 sampai 4 kali dari jumlah investasi sebenarnya.⁷
5. Terbukanya lebih dari 3000 lapangan kerja baru.⁸
6. Sedangkan bagi pihak Amerika sendiri, hasil dari eksplorasi ini akan menambah cadangan minyak dalam negeri untuk kebutuhan suplai industri dan transportasi, mengingat harga minyak dunia yang sangat mahal.⁹

⁵ Kompas, Kerasnya Blok Cepu, 21 Maret 2009

⁶ *ibid*

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*

⁹ *ibid*

B. Dasar Penataan Migas Indonesia

1. Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 02.P/075/Mpe/1992 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi Dan Eksploitasi Migas

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No: 02.P/075/Mpe/1992 berisi tentang ketentuan umum, rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan, penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, dan penyelidikan dasar lainnya, pemboran eksplorasi, pemboran penilaian, pemboran pengembangan, kegiatan produksi minyak dan gas bumi, perolehan minyak dan gas bumi, data dan informasi migas, lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya serta ketentuan penutup.

Dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No: 02.P/075/Mpe/1992 menjelaskan mengenai kegiatan produksi minyak dan gas bumi yang berdasarkan dari pasal 12 sampai dengan pasal 16. Salah satunya berbunyi : ¹⁰

“Pengusaha dapat memproduksi minyak bumi dan atau gas bumi dari suatu sumur produksi yang bersifat sebagai sumur sembur alam.” (Pasal 13 ayat 1).

¹⁰ Aria, “Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi No : 02.P/075/Mpe/1992 Tentang Pedoman pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Pasal 1” dalam <http://tech.groups.yahoo.com/group/rsgisforum-net/message/8383>, diakses 17 Maret 2009.

“Pembuatan sumur sembur buatan dan atau sumur dengan usaha lanjutan (Enhanced Oil Recovery) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.” (Pasal 13 ayat 2).

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap kegiatan produksi minyak dan gas bumi harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal terlebih dahulu. Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam prosesnya yang berindikasi dapat merugikan Negara maka Direktur Jenderal mempunyai hak untuk membatalkan kegiatan tersebut.

2. UU No.22 Tahun 2001 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas

a. Perubahan Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001

Pemerintah lewat RUU Migas berjanji untuk mengikis habis monopoli di Pertamina. Namun yang ditawarkan adalah membuka suatu kesempatan bagi perusahaan swasta lain untuk ikut berkompetisi dalam distribusi dan pemasaran migas. Sepintas ide ini cukup menarik, namun ancaman di balik itu sungguh sangat mengerikan. Saat ini yang paling siap untuk berkompetisi adalah perusahaan-perusahaan multinasional seperti Petronas, ExxonMobil, Shell, Caltex, Texaco, Unocal, Vico, Total dan lain sebagainya. Karena mereka yang paling siap, maka mereka yang akan merebut pangsa pasar distribusi dan pemasaran migas di Indonesia. Maka yang akan terjadi adalah bergantinya monopoli Pertamina pada oligopoli perusahaan multinasional. Ancaman besarnya modal yang akan masuk pada industri migas di Indonesia, juga tidak mendapat perhatian semua pihak.

b. Isi dari Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001

Pada tahun 2001, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2001 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970. Perubahan Undang-Undang telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan industri migas nasional serta kedudukan Pertamina, antara lain sebagai berikut :

1. Sebelumnya hak mineral dikuasai Negara (dengan kapital N), sekarang dikuasai negara (dengan n kecil yang diartikan hanya Pemerintah saja).
2. Sebelumnya hak pertambangan dikuasai Pemerintah atas nama Negara dan didelegasikan kepada Perusahaan Negara Pertamina, sekarang didelegasikan kepada Badan Pelaksana Migas.
3. Sebelumnya economic-right diberikan kepada Perusahaan Negara (Pertamina), sekarang diberikan kepada Badan Pelaksana Migas.
4. Sebelumnya Pertamina adalah Badan Usaha atau korporasi, sekarang Badan Pengelola Migas adalah Badan Hukum atau bukan korporasi.
5. Sebagai konsekuensi butir 4, bila terjadi tuntutan hukum pada masa lalu yang bertanggung jawab adalah Pertamina, sekarang yang bertanggung jawab adalah Pemerintah Negara. Kebijakan ini bertolak belakang dengan praktek-praktek multinasional corporation diman untuk melindungi perusahaan dari tuntutan hukum mereka justru membentuk paper company, sedang kita justru melimpahkan tuntutan hukum menjadi kewajiban Pemerintah Negara.

6. Sebelumnya pada Kontrak Bagi Hasil, kontraktor kedudukannya di bawah Pertamina sebagai perusahaan yang dikontrak, sekarang pada Kontrak Kerja Sama kedudukan hukum kontraktor sejajar dengan Badan Pengelola Migas.
7. Sebelumnya semua ketentuan perpajakan dan bea masuk diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970, sekarang ketentuan tentang ketentuan perpajakan dan bea masuk diatur menurut masing-masing Undang-Undang.
8. Sebelumnya kepastian hukum dan kepastian operasi lebih jelas dan tegas tetapi Undang-Undang baru menimbulkan keraguan pada para kontraktor, sehingga investasi turun, produksi minyak turun 30% dan penerimaan negara dari sektor migas sejak tahun 2001 turun.
9. Sebelumnya Pertamina masih mendapatkan penerimaan dari hasil pengelolaan kontrak bagi hasil k.l. Rp. 2-4 triliun pertahun. Sekarang penerimaan tersebut digunakan oleh Badan Pengelola Migas.

c. Alasan Perubahan Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001

Persoalan kelangkaan BBM, masalahnya bukan hanya karena minimnya stok atau masalah pelayanan distribusi Pertamina, karena volume dan kapasitas BBM di dalam negeri sebenarnya mencukupi. Sebagaimana yang terungkap dalam makalah berjudul, *“The impact of oil industry liberalization on the efficiency of petroleum fuels supply for the domestic market in Indonesia*, tulisan Dr. Kurtubi, head office Pertamina dan Pusat Kajian Minyak dan Energi, bahwa di Indonesia ada sekitar 60 ladang minyak (basins), 38 di antaranya telah dieksplorasi, sementara sisanya masih belum. Di dalamnya terdapat sumber daya

energi yang luar biasa, kira-kira mencapai 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubuk (TCF) gas.

Di sana terdapat stok cadangan energi sekitar 9.67 miliar barel minyak dan 146.92 TCF. Sementara kapasitas produksinya hingga tahun 2000 baru sekitar 0,48miliar barel minyak dan 2,26 triliyn TCF. Hal ini menunjukkan bahwa volume dan kapasitas BBM sebenarnya mampu mencukupi kebutuhan rakyat di dalam negeri. Akan tetapi, mengapa kelangkaan BBM ini bisa terjadi?

Memang, pembangunan ekonomi Indonesia selama ini, diakui atau tidak, sangatlah bercorak kapitalistik. Dengan menguatnya ide liberalisme dan kapitalisme, kita tampaknya benar-benar tengah menjadi mangsa kapitalis global melalui apa yang kita sebut dengan program “liberalisasi ekonomi”, salah satunya adalah liberalisasi sektor migas (minyak dan gas).

Jika ditelusuri ke belakang, BBM bukan masalah baru bagi Indonesia. Akan tetapi, jika disimak masalah BBM yang terjadi belakangan ini, masalah ini tidak lepas dari UU Migas No. 22 Tahun 2001. Dalam UU tersebut diatur tentang pembatasan kewenangan Pertamina sebagai pemain utama (*single player*) di sektor ini, sekaligus memberikan hak atau kewenangan kepada perusahaan minyak lain, baik domestik maupun asing. Pada saat yang sama, pemerintah mengurangi subsidi untuk BBM sejak awal tahun 2005. Hal ini menyebabkan Pertamina tidak mampu melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap ladang minyak baru. Akibatnya, kemampuan produksi Pertamina juga menurun, baik dari segi volume maupun kapasitasnya.

C. Profil PT. Pertamina (Persero) dan ExxonMobil Corporation

1. Riwayat Singkat PT. Pertamina (Persero)

Pada tahun 1945, Jepang, dengan disaksikan pihak Sekutu, menyerahkan Tambang Minyak Sumatera Utara kepada Indonesia. Daerah perminyakan ini adalah bekas daerah konsesi BPM sebelum Perang Dunia Kedua. Pada masa revolusi fisik, tambang minyak ini hancur total. Lapangan-lapangan minyak di daerah lain di Indonesia dapat dikuasai kembali oleh Belanda dan pihak asing berdasarkan hak konsesi, namun lapangan minyak di Sumatera Utara dan Aceh dapat dipertahankan bangsa Indonesia.

Semenjak kedaulatan Republik Indonesia diakui pada Desember 1949, hingga akhir 1953 Pemerintah masih ragu apakah akan mengembalikan Tambang Minyak Sumatera Utara kepada BPM atau dikuasai sendiri. Penunjukkan 'koordinator' untuk pertambangan oleh Menteri Perekonomian pada tahun 1954 belum membawa perbaikan.

Pada bulan Oktober 1957, Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada waktu itu Jenderal A.H. Nasution menunjuk Kolonel Dr. Ibnu Sutowo untuk membentuk Perusahaan Minyak yang berstatus hukum Perseroan Terbatas. Pada tanggal 10 Desember 1957 didirikan P.T. Pertambangan Minyak Nasional Indonesia (P.T. PERMINA) dengan Kol.Dr. Ibnu Sutowo sebagai Presiden Direktur. Berdasarkan UU No 19 tahun 1960 tentang perusahaan negara, P.T Permina sebagai Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Negara dengan anggota-anggota Direksi waktu itu adalah :

Kol. Dr. Ibnu Sutowo , sebagai Presiden Direktur

Let.Kol.S.M. Geudong, sebagai Direktur,

Let.Kol.J.M Pattiasina, sebagai Direktur.

Prolog Masa 1871 - 1885 ¹¹

(Masa Awal Pencarian dan Penemuan Minyak di Indonesia)

Industri minyak Indonesia mulai di awal abad 19:

- 12 tahun setelah pemboran minyak pertama di Titusville, Pensylvania, AS 1859
- Reering 1871 - Zilker 1885 masa pencarian dan penemuan minyak (mulai pemboran 1883 di Telaga Tiga)

Prolog Masa 1885 - 1945

(Masa Eksploitasi Minyak oleh Penjajah)

- Pasca 1885 Berdiri Royal Dutch Company di Pangkalan Berandan (Sumatera Utara)
- 1887 - Pencarian minyak di Jawa Timur (Surabaya)
- 1888 - Konsesi Sultan Kutai dengan JH Meeten di Sanga-Sanga
- 1890 - Pendirian kilang Wonokromo & Cepu
- 1892 - Pembangunan kilang minyak di Pangkalan Berandan
- 1894 - Pendirian kilang Balikpapan oleh Shell Transport and Trading
- 1899 - UU Pertambangan Pemerintah Hindia Belanda (Indische Mijnwet) yang mengatur kegiatan pencarian minyak bumi di Indonesia

AS dan Belanda

- AS berusaha masuk ke Indonesia tapi dicegah pemerintah Belanda. Namun karena tekanan AS kepada Den Haag, akhirnya muncul

¹¹ Profil Pertamina, <http://www.pertamina.com>

perusahaan patungan AS dan Belanda yakni SHELL dan NIAM (Jambi, Bunyu, dan Sumatera Utara)

- Standard Oil masuk dan dipecah menjadi Standard Oil of New Jersey (membentuk Anak Perusahaan American petroleum Co) dan Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij (NKPM).
- NKPM menemukan lapangan Talang Akar (Sumsel) yang merupakan lapangan terbesar di Hindia Belanda
- Mendirikan Kilang Sungai Gerong di seberang Kilang Plaju milik Shell
- 1933 Standard Oil of New Jersey yang mendapat konsesi Jawa dan Madura menggabungkan seluruh usahanya ke dalam Standard Vacuum Petroleum Maatschappij (SVPM) dalam bentuk patungan. Di dalamnya ada bagian pemasaran Standard Oil of New York sekarang bernama Mobil Oil. Penggabungan ini diubah statusnya menjadi PT Standard Vacuum Petroleum (Stanvac) pada 1947.
- 1922 Standard Oil of California masuk ke Kalimantan dan Irian Jaya
- 1928 Gulf Oil (AS) masuk ke Sumatera Utara
- 1929 Standard Oil of California masuk ke Sumatera Utara
- 1933 Standard Oil of New Jersey yang mendapat konsesi Jawa dan Madura menggabungkan seluruh usahanya ke dalam Standard Vacuum Petroleum Maatschappij (SVPM) dalam bentuk patungan. Di dalamnya ada bagian pemasaran Standard Oil of New York sekarang bernama Mobil Oil.
- 1947 Penggabungan SVPM diubah statusnya menjadi PT Standard Vacuum Petroleum (Stanvac).

Catatan:

Di zaman Jepang, usaha yang dilakukan umumnya adalah merehabilitasi lapangan dan sumur yang rusak akibat bumi hangus atau pengeboman.

Prolog Masa 1945 – 1957

(Masa Perjuangan Minyak Pra-Pertamina)

- Selama perang kemerdekaan kegiatan pencarian minyak berhenti.
- Perjuangan Pangkalan Berandan, Sumatera Utara, dan Aceh Timur
- Muncul "Laskar Minyak" mensuplai keperluan pesawat terbang dan kendaraan lain
- Berdiri perusahaan minyak pribumi:
 - 1945 didirikan PTMSU
 - 1945 didirikan PTMN Cepu di lokasi ex SHELL (Lap. Nglobo, Semanggi Ledok dan Wonokromo)
 - 1950 PTMN Cepu berubah menjadi PTMNRI Cepu
 - 1950 PTMN Sumatera Utara berubah menjadi PTMRI Sumatera Utara
 - 1954 PTMNRI Sumatera Utara berubah menjadi TMSU
 - 22 Juli 1957 TMSU ditetapkan menjadi PT ETMSU (eksploitasi)
- Agustus 1951 Mosi Mohammad Hasan
 - Gubernur Sumatera Mr. Teuku H. Moh. Hasan mengajukan sebuah mosi yang memperjuangkan pertambangan minyak dan disokong oleh kabinet secara bulat pada 2 Agustus 1951 dan dibentuk sebuah komisi.

- Perjuangan di parlemen salah satunya adalah merintis UU pertambangan yang mengganti Indische Mijnwet
- 24 Oktober 1956 ã PP No. 24/1956
 - Diputuskan tambang minyak Sumatera Utara tidak dikembalikan kepada SHELL

1957

- Juli 1957 Jend. AH. Nasution mendapatkan pelimpahan tugas tambang minyak Sumut. Rehabilitasi lapangan dan ekspor hasil untuk pembangunan.
- 1957 Pemerintah RI mengambil alih semua perusahaan Belanda di Indonesia. (Kecuali SHELL karena kepemilikannya bersifat internasional)
- Perubahan nuansa kedaerahan menjadi nasional (AH Nasution, 1957)
- 10 Desember 1957 berdirinya PT Permina sebagai perusahaan minyak pertama bersifat nasional

Pasca 1957

- 1959 berdiri NV NIAM (NV Nederlands Indische Aardolie Maatschappij)
 - Perusahaan patungan AS dan Belanda
 - 31 Des 1959 50% saham diambil alih pemerintah RI dan NV NIAM berubah jadi PT Permindo
- 1961 PT Permindo dikukuhkan menjadi PN Permigan
- Tahun 1961 : PT. PERMINA menjadi PN. PERMINA dan PTMN menjadi PN. PERMIGAN
- 4 Jan 1966 Permigan dilikuidasi karena peristiwa G30S/PKI (Perbum)
 - Aset Permigan diberikan kepada PN Pertamina dan PN Permina

- 1968 PN Pertamina dan PN Permina merger menjadi PN Pertamina
- 1971 diterbitkan UU No. 8 tahun 1971 yang mengukuhkan PN Pertamina menjadi Pertamina
- 2001 diterbitkan UU Migas No 22 tahun 2001 yang akhirnya mengantar Pertamina menjadi PT Pertamina (Persero)
- 2003 Pertamina berubah status menjadi PT Pertamina (Persero)
 - Perubahan mendasar ada pada peran regulator menjadi player

Era Persero

- Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara yang telah berubah bentuk menjadi PT. Persero yang bergerak di bidang energi, petrokimia dan usaha lain yang menunjang bisnis Pertamina, baik di dalam maupun di luar negeri yang berorientasi pada mekanisme pasar.
- Modal Setor PT. Pertamina (Persero) :
 - PT. Pertamina (Persero) merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara.
 - Modal Disetor (Penanaman Modal Negara/PMN) PT. Pertamina (Persero) pada saat pendirian adalah Rp. 100 Trilyun.
 - Nilai Rp. 100 Trilyun tersebut diperoleh dari :

"Seluruh Kekayaan Negara yang selama ini tertanam pada Pertamina, yang meliputi Aktiva Pertamina beserta seluruh Anak Perusahaan, termasuk Aktiva Tetap yang telah direvaluasi oleh Perusahaan Penilai Independen, dikurangi dengan semua Kewajiban (Hutang) Pertamina".

PT. Pertamina (Persero) mengemban tugas negara untuk mengusahakan dan mengembangkan potensi sumber daya minyak, gas dan panas bumi

berdasarkan pada landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusi UUD 1945. Pada Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran negara. Selain itu landasan operasionalnya adalah UU Migas No. 22 tahun 2001.¹²

Dari segi organisasi, PT. Pertamina dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang membawahi 4 Direktur, yaitu :

- Direktur Hulu
- Direktur Hilir
- Direktur Pengembangan
- Direktur Keuangan

Sedangkan ruang lingkup PT. Pertamina seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Pasal 6 yaitu :

- Eksplorasi dan eksploitasi
- Pemurnian dan pengolahan
- Pengangkutan dan penjualan
- Bidang-bidang usaha lain yang masih ada hubungannya dengan pengusahaan minyak dan gas bumi (dengan persetujuan Presiden)¹³

Adapun tugas pokok Pertamina yang telah tercantum dalam UU No.4/PRP tahun 1960 adalah sebagai berikut :

- Mencukupi kebutuhan minyak dan gas bumi yang terus meningkat sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan pelaksanaan pembangunan nasional

¹² *ibid*

¹³ *ibid*

- Memenuhi kebutuhan dana dan devisa untuk kebutuhan pembangunan nasional
- Melaksanakan perimbangan dan menguntungkan antara konsumsi dalam negeri dan ekspor
- Mempertahankan kedudukan Indonesia dalam pasar ekspor
- Memperbesar pendapatan negara yang berasal dari minyak gas dan bumi
- Turut memecahkan masalah pengangguran ¹⁴
- Turut meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

Sehingga dapat disimpulkan peran Pertamina secara keseluruhan sebagai berikut :

- Sebagai sumber dana dan devisa untuk membiayai pembangunan nasional
- Sebagai stabilisator dan dinamisator pembangunan nasional khususnya dalam pencakupan kebutuhan energi dengan menyediakan dan menyalurkan bahan bakar dan minyak bumi
- Sebagai penyalur bahan baku industri petrokimia
- Sebagai wahan alih teknologi dan penyediaan lapangan kerja
- Sebagai simulator pengembangan ekonomi nasional dan regional

2. Riwayat Singkat ExxonMobil Corporation

Perusahaan Exxon Mobil atau ExxonMobil (NYSE: XOM) yang bermarkas di Texas ini adalah sebuah perusahaan penghasil dan pengecer minyak yang dibentuk pada 30 November 1999 melalui penggabungan Exxon dan Mobil.

¹⁴ *ibid*

ExxonMobil adalah orangtua perusahaan Exxon, Mobil dan Esso di seluruh dunia. ExxonMobil merupakan perusahaan terbuka yang terbesar di dunia. Keuntungan operasinya pada 2005 sebesar AS\$36,13 milyar (sebuah rekor untuk perusahaan diperdagangkan publik), sedikit lebih kecil dari PDB Azerbaijan, sedangkan pendapatannya lebih besar dari PDB Arab Saudi. ExxonMobil berkantor pusat di Irving, Texas. Bersama dengan Shell, BP dan Total, Exxon Mobil merupakan empat perusahaan minyak terbesar di dunia.¹⁵

Sampai saat ini ExxonMobil memiliki modal sekitar 36,13 miliar dollar AS untuk pengembangan aktivitasnya dengan memiliki 88.300 karyawan, dan kantor-kantor perwakilan yang tersebar di belahan dunia, salah satunya di Indonesia. Hal ini berarti menunjukkan bahwa ExxonMobil menyadari bahwa Indonesia merupakan lahan eksplorasi yang potensial dan menyimpan cadangan sumber energi yang besar khususnya minyak dan gas. ExxonMobil merupakan perusahaan minyak raksasa Amerika yang mumpuni dalam kemajuan teknologi, kemampuan finansial, dan kemampuan efisiensi pendanaan dalam pengelolaannya.¹⁶

Selama 125 tahun terakhir ExxonMobil telah berkembang dari daerah staf pemasaran dari minyak tanah di AS kepada publik terbesar minyak bumi dan Petrochemical perusahaan di dunia. Saat ini ExxonMobil beroperasi di sebagian besar negara-negara di dunia dan dikenal dengan nama-nama merek terkenal: *Exxon*, *Esso* dan *Mobil*. ExxonMobil membuat produk yang modern dengan kendaraan transportasi, daya kota, dan memberikan industri Petrochemical blok bangunan yang mengarah ke ribuan barang konsumen.

¹⁵ <http://www.wikipedia/ExxonMobil.com>

¹⁶ *ibid*

Dengan adanya kerjasama ExxonMobil dan Pertamina diharapkan bisa berpengaruh terhadap sektor pertambangan khususnya penemuan-penemuan ladang-ladang minyak baru, karena melalui penemuan ladang-ladang minyak baru akan meningkatkan kembali produksi minyak mentah nasional khususnya minyak bumi.¹⁷

D. Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi di Blok Cepu

Eksplorasi atau pencarian minyak bumi merupakan suatu kajian panjang yang melibatkan beberapa bidang kajian kebumian dan ilmu eksak. Untuk kajian dasar, riset dilakukan oleh para geologis, yaitu orang-orang yang menguasai ilmu kebumian. Mereka adalah orang yang bertanggung jawab atas pencarian hidrokarbon tersebut.¹⁸

Kegiatan eksplorasi sangat penting dilakukan sebelum pengusahaan barang tambang dilakukan mengingat keberadaan bahan galian yang penyebarannya tidak merata dan sifatnya sementara yang suatu saat akan habis tergali. Kegiatan eksplorasi ini ditujukan untuk menemukan cadangan minyak dan gas terbaru, yang dikategorikan sebagai cadangan terbukti (proven reserve) dan cadangan potensial (potensial reserve).

Kegiatan eksplorasi ini mencakup evaluasi sumber daya, pemberian izin eksplor, contoh bantuan migas, penyelidikan geofisika dan pemboran eksplorasi.¹⁹

1. Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Eksplorasi minyak bumi dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Eksplorasi_minyak_bumi

¹⁹ Ditjen Migas, Data dan Informasi Minyak dan Gas Bumi, Korpri Sub Unit Ditjen Migas, Jakarta, 2003. hal 29

Sumber daya minyak bumi di Indonesia beberapa tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Penambahan sumber daya minyak dan gas bumi ini disebabkan oleh penambahan struktur di blok wilayah kerja baru, revisi dari hasil evaluasi ulang prospek terdahulu karena adanya penambahan data baru dan bertambahnya angka sumber daya dari struktur-struktur lama karena hasil evaluasi ulang.

Potensi sumber daya minyak dan gas bumi tersebut terakumulasi pada 60 cekungan sediment yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari ke 60 sedimen tersebut, baru 38 cekungan yang sudah dieksplorasi dan sisanya sebanyak 22 cekungan belum dieksplorasi.

2. Penyelidikan Geofisika

Salah satu metode geofisika yang dilakukan untuk mengetahui kondisi geologi di bawah permukaan adalah melalui metode survei seismik. Prinsip dasar metode survei seismik adalah gelombang suara yang dipantulkan oleh lapisan batuan yang dilalui dan diterima kembali oleh serangkaian alat penerima receiver (geophone atau hydrophone).²⁰

Terdapat dua jenis seismik, yaitu :

1. Penyelidikan seismik 2D yaitu penyelidikan yang dilakukan untuk daerah yang lebih luas atau regional sebagai penyelidikan awal untuk mengetahui struktur lokasi tersebut.

²⁰ Sanusi, Bachrawi, Potensi Ekonomi Migas Indonesi, PT. Rineka Eka Cipta, Jakarta, 2004, hal 50.

2. Penyelidikan seismik 3D yaitu penyelidikan yang dilakukan untuk daerah yang lebih sempit atau penyelidikan detail sebagai penyelidikan untuk penentuan lokasi pengeboran.

Secara umum penyelidikan seismik yang dilakukan oleh Indonesia menunjukkan kenaikan, dengan ditemukannya cadangan migas yang baru. Penyelidikan seismik ini dilakukan oleh para kontraktor di daerah eksplorasi.

3. Pengeboran Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi

Yang dimaksud dengan pengeboran eksplorasi yaitu pengeboran pembuktian ada tidaknya kandungan migas serta batas penyebaran pada suatu jebakan. Selama ini kegiatan eksplorasi umumnya masih dilakukan pada lahan-lahan yang dinilai relatif beresiko rendah, termasuk daerah lepas pantai yang dangkal. Dengan kecenderungan penemuan cadangan baru yang semakin kecil di lahan konvensional maka pengembangan lapangan baru cenderung menurun, padahal harga minyak saat ini mahal, dan produksi minyak nasional sedang menurun.

4. Gambaran Singkat Wilayah Eksplorasi

Blok Cepu saat ini memiliki tujuh lapangan migas yang masing-masing di Kemuning dan Alas Dara, Kedung Tuban, Cendana, Jambaran, Sukowati, dan Banyu Urip. Kemuning, Alas Dara, Kedung Tuban terletak di Kabupaten Blora Jawa Tengah, sedangkan Cendana, Jambaran, Sukowati, dan Banyu Urip terletak di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.

Di lapangan migas Kemuning dan Alas Dara potensi migasnya bisa mencapai 7,3 juta barel, di Kedung Tuban bisa mencapai 28 juta barel minyak,

Cendana potensi migasnya mencapai 61 juta barel minyak, Jambaran 227 juta barel minyak, Sukowati kandungan migasnya sekitar 42,5 juta barel minyak, dan yang terakhir Banyu Urip yang terletak di Desa Mojodelik dengan luas lapangannya sebesar 3 hektar diperkirakan potensi migasnya sangat besar bisa mencapai 507 juta barel minyak. Lapangan Banyu Urip ini merupakan temuan terbaru yang diperkirakan produksi maksimalnya bisa mencapai 165.000 barel per hari atau setara dengan 20 persen produksi minyak nasional.